BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan adalah salah satu masalah perekonomian utama dalam Pembangunan di Indonesia. Ketimpangan ini mencerminkan ketidakmerataan hasil pembangunan dan persebaran pendapatan di masyarakat mulai dari kalangan atas hingga bawah. Menurut Mankiw (2013), ketimpangan pendapatan dapat muncul akibat perbedaan kemampuan, tingkat pendidikan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi yang tidak merata di masyarakat. Ketimpangan pendapatan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata cenderung menurunkan kesejahteraan sosial karena fungsi utilitas individu terhadap pendapatan, ketika pendapatan tidak merata, masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah sering kali menghadapi keterbatasan terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Redistribusi yang adil dan efektif dapat membantu memulihkan potensi kesejahteraan ini dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat untuk berkembang, sambil tetap mempertahankan insentif untuk berusaha dan berinovasi. Namun jika kebijakan ini dijalankan, redistribusi akan mengurangi keinginan masyarakat untuk menghasilkan lebih banyak uang (Herzer & Vollmer, 2012).

Berbagai faktor yang mendasari ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Keterbatasan pemerataan pembangunan meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi ekonomi yang besar, distribusi pembangunan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan antara pusat dan daerah. Daerah perkotaan seperti Yogyakarta cenderung mendapatkan perhatian lebih dalam hal infrastruktur dan investasi, sementara daerah pedesaan tertinggal. Penyebaran sektor ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta mengandalkan sektor pariwisata dan pendidikan yang terpusat di Kota Yogyakarta (Saputra, 2012), sementara daerah lain lebih bergantung pada sektor pertanian yang cenderung lebih rentan terhadap perubahan cuaca dan harga pasar yang fluktuatif. Ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dipengaruhi oleh kemiskinan struktural, di mana sebagian besar penduduk di daerah pedesaan

memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, yang membuat mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan.

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks Gini provinsi Istimewa Yogyakarta adalah 0,45, sedangkan rata-rata nasional adalah 0,38. Seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah ini, ada tingkat pendapatan yang tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 1.1 Perbandingan Gini Ratio Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Indonesia Tahun 2010-2022.

Sumber BPS Daer<mark>ah</mark> Istimewa <mark>Y</mark>ogyakarta 2023

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa Gini Ratio Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka yang lebih tinggi dibanding gini ratio nasional di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yang berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran terbuka, dan upah minimum menggunakan metode panel ARDL. Salah satu penelitian yang juga meneliti ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penelitian yang dilakukan oleh Krisna Gita Suryani (2021) dengan judul Dampak Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pengangguran Terhadap Ketidaksamaan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2010-2018) yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa IPM, upah minimum Kabupaten/Kota, dan pengangguran memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap distribusi pendapatan. Penelitian Selanjutnya oleh Yery Arif

(2021) dalam penelitiannya yang berjudul Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Karesidenan Malang Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa hasil analisis dan penelitian tentang dampak jumlah penduduk, IPM, minimum Kabupaten/Kota, dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap persebaran pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif (2017) dengan judul "Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya" menunjukkan bahwa analisis regresi data panel menggunakan Model Efek Acak (REM) merupakan metode yang paling efektif untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji validitas, yang juga dikenal sebagai uji tersebut, variabel yang memiliki d<mark>ampak si</mark>gnifikan terhadap pembangunan ekonomi provinsi Jawa Timur antara tahun 2011 dan 2015 adalah variabel IPM, yang memiliki dampak positif. Hubungan antara upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa variabel kependudukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan, variabel upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan, dan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan. Dalam konteks ketimpangan pendapatan ekonomi, selalu terdapat permasalahan struktural yang menarik perhatian di setiap daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, dan judul penelitian ini adalah "Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2022" yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami hubungan antar variabel dengan ketimpangan pendapatan menggunakan metode panel ARDL guna melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel, juga menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka panjang dan jangka pendek?
- 2. Bagaimana hubungan indeks pertumbuhan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka panjang dan jangka pendek?
- 3. Bagaimana hubungan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka panjang dan jangka pendek?
- 4. Bagaimana hubungan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka panjang dan jangka pendek?

1.3 Tujuan

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka panjang dan jangka pendek.
- 2. Untuk menganalisis hubungan indeks Pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka panjang dan jangka pendek.
- 3. Untuk menganalisis hubungan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka panjang dan jangka pendek.
- 4. Untuk menganalisis hubungan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka panjang dan jangka pendek.